



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Tangerang Tahun 2015

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**  
Walikota Tangerang

**H. SACHRUDIN**  
Wakil Walikota Tangerang

**I. Latar Belakang:**  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya penciptaan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Kepala Daerah wajib menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, yang secara teknis penyampaiannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



**II. Maksud dan Tujuan**

- A. Maksud:**  
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun 2015 merupakan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2015.
- B. Tujuan:**  
Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2015 untuk mendapatkan umpan balik (feed back) dari masyarakat berupa tanggapan atau saran secara lisan dan/atau tertulis dengan terbit dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.

**III. Ruang lingkup:**

- 1. Substansi/Materi:**  
Muatan ILPPD merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
- Urusan Desentralisasi**, yang berupa penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan;
  - Tugas Pembantuan**, yang meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.
- Tugas Umum Pemerintahan**, yang berupa kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan, serta berbagai permasalahan dan solusinya.
- 2. Wilayah:**  
ILPPD yang diinformasikan adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kota Tangerang.
- 3. Waktu:**  
ILPPD yang diinformasikan adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2015.



**IV. Gambaran Umum Daerah**

**A. Kondisi Geografis**  
Kota Tangerang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1993. Berada di bagian Timur Provinsi Banten, merupakan kota terbesar di Provinsi Banten dan ketiga terbesar di kawasan perkotaan Jabodetabek. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Tahun 2011, luas wilayah Kota Tangerang adalah ± 184,24 km<sup>2</sup> (termasuk Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, seluas ± 19,69 km<sup>2</sup>). Kota Tangerang berjarak ± 60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan ± 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Hal ini menjadikan Kota Tangerang sedikit banyak mendapatkan dampak positif maupun negatif dari perkembangan Ibukota Negara. Pesatnya perkembangan Kota Tangerang didukung oleh tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan kawasan Jabodetabek, serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan Internasional Tanjung Priok. Letak geografis Kota Tangerang yang strategis tersebut telah mendorong pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang saat ini. Kondisi tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.



Wilayah Kota Tangerang, berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta, dan Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kecamatan Curug, Serpong dan Pondok Aren Kabupaten Tangerang;
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan DKI Jakarta;
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.



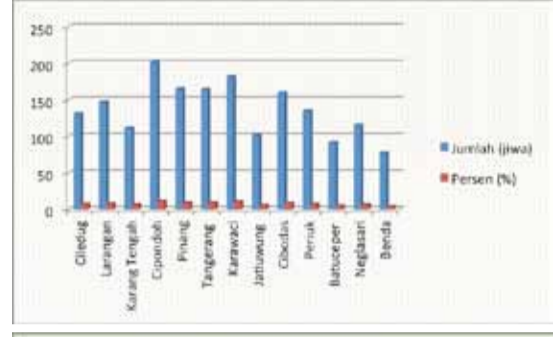
**B. Wilayah Administrasi Kota Tangerang**

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, secara administrasi Kota Tangerang terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Dimana total jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 965 dan Rukun Tetangga sebanyak 4.768. Distribusi luas wilayah dan jumlah kelurahan berdasarkan wilayah kecamatan seperti pada gambar berikut:



**C. Gambaran Umum Demografis**

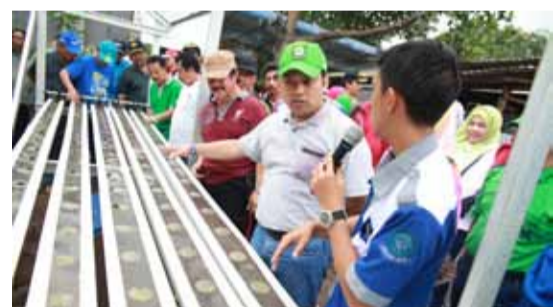
Gambaran umum demografis Kota Tangerang bisa dilihat melalui berbagai data/informasi yang terkait dengan kependudukan, yaitu antara lain: jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, dll, seperti terlihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Jumlah Penduduk Kota Tangerang relatif seimbang antara perempuan dengan laki-laki dengan bentuk piramida penduduk yang mencerminkan adanya potensi penduduk produktif (20-50 tahun) yang tinggi serta harapan hidup yang meningkat. Sementara itu, dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), jumlah penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk selama Tahun 2015 terlihat bahwa Kecamatan Cibodas dan Tangerang masing-masing merupakan kecamatan yang mempunyai LPP tertinggi dan terendah, Kecamatan Cipondoh dan Benda masing-masing merupakan kecamatan yang paling banyak dan paling sedikit jumlah penduduknya, serta Kecamatan Cibodas dan Jatitujuh masing-masing merupakan kecamatan yang paling padat dan paling jarang penduduknya. Hal ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah tentang fungsi wilayah baik sebagai hunian/perumahan maupun sebagai kawasan industri daerah. Selain itu, perkembangan kependudukan Kota Tangerang jika dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, perkembangannya selama Tahun 2015 bisa dilihat pada gambar berikut ini:



Berdasarkan gambar di atas, pada Tahun 2015 secara umum ketenagakerjaan di Kota Tangerang relatif stabil (tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan). Hal ini terkait dengan kondisitas Kota Tangerang yang relatif aman dan terkendali. Dengan melihat hal tersebut, maka masih memungkinkan adanya kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di berbagai sektor usaha di Kota Tangerang.



**D. Gambaran Perekonomian Daerah**

Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses yang berdampak terhadap kondisi ekonomi daerah serta tingkat kehidupan masyarakat di daerah yang secara nyata dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan daya beli masyarakat. Perekonomian daerah dapat menjadi reflektor dan tolak ukur kinerja perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan di bidang ekonomi. Kerangka ekonomi daerah akan memuat faktor fundamental ekonomi daerah yang memberikan kontribusi agregat ekonomi, berdasarkan penggunaan maupun sektor ril lapangan usaha dalam batasan-batasan kemampuan ekonomi daerah.



Pembangunan perekonomian di wilayah Kota Tangerang beserta pertumbuhan dan perkembangannya yang didasarkan pada berbagai indikator perekonomian daerah (Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pemulihan Sektor PDRB, Laju Inflasi Harga, dll) selama Tahun 2015 bisa dilihat sebagai berikut:



Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang pada Tahun 2014 sebesar 5.03% lebih tinggi dari LPE Provinsi Banten (5.01%) dan LPE Nasional (5.01%). Jika dilihat dari kecenderungannya, LPE Kota Tangerang dari tahun 2010-2014 relatif stabil seiring dengan LPE Provinsi Banten dan LPE Nasional. Pertumbuhan sektor terbesar dan terkecil adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi (10,36%) dan Sektor Bangunan (-5,83%), sedangkan kontribusi terbesar dan terkecil adalah sector industri pengolahan (42,97%) dan Sektor Pertanian (0,15%). Sementara itu terlihat bahwa laju inflasi Kota Tangerang pada Tahun 2014 sebesar 10,03% yang

merupakan inflasi tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun namun masih di bawah perkiraan RPJMD (10,12%). Mengenai investasi, berikut disajikan tabel perkembangan investasi di Kota Tangerang pada PMA dan PMDN selama Tahun 2010-2015 yang secara umum relatif meningkat setiap tahunnya.

Tabel Perkembangan Investasi PMA dan PMDN Kota Tangerang Tahun 2010-2015\*

Tahun	Urutan	PMA	PMDN	Jumlah
2010	Jumlah Perusahaan	266	141	407
	Investasi	US\$ 2.720.352.000 Rupiah 2.535.006.927.797	9.353.993.711.822	2.720.352.000 11.889.000.639.619
2011	Jumlah Perusahaan	282	141	423
	Investasi	US\$ 2.763.119.580 Rupiah 3.083.660.459.698	9.353.993.711.822	2.763.119.580 12.437.654.171.520
2012	Jumlah Perusahaan	282	141	423
	Investasi	US\$ 3.103.973.888 Rupiah 3.335.854.900.000	14.372.979.417.648	3.103.973.888 17.466.639.877.346
2013	Jumlah Perusahaan	292	141	433
	Investasi	US\$ 3.072.790.288 Rupiah 3.559.425.660.000	13.060.000.000.000	3.072.790.288 16.619.425.660.000
2014	Jumlah Perusahaan	44	44	88
	Investasi	US\$ 57.052.195 Rupiah 2.085.472.188.395	-	57.052.195 2.085.472.188.395
2015*)	Jumlah Perusahaan	78	62	140
	Investasi	US\$ 309.332,7 Rupiah 3.866.658.750.000	1.196.039.100.000	309.332,7 5.062.697.850.000

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Banten, 2014  
\*) Angka Sementara Sampai Dengan Bulan Oktober Tahun 2014

**V. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018**

**Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah (Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Prioritas Daerah)**  
Arah kebijakan umum Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018, diarahkan untuk pencapaian visi dan misi daerah berupa:

**VISI:**  
"TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUKARIMAH"

**MISI:**

- Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan Profesional;
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi;
- Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi;
- Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berkualitas;
- Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Nyaman.

Upaya pencapaian visi dan misi tersebut dilakukan melalui 9 strategi umum serta 7 arah kebijakan daerah dengan 11 prioritas pembangunan.

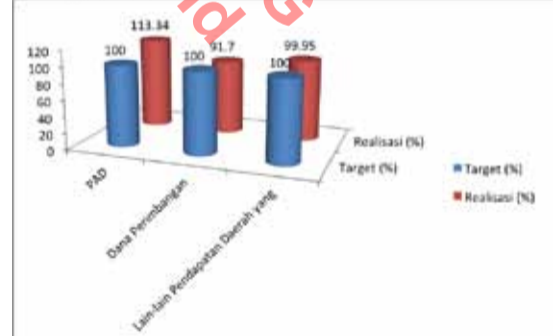


**VI. Pengelolaan Keuangan Daerah**

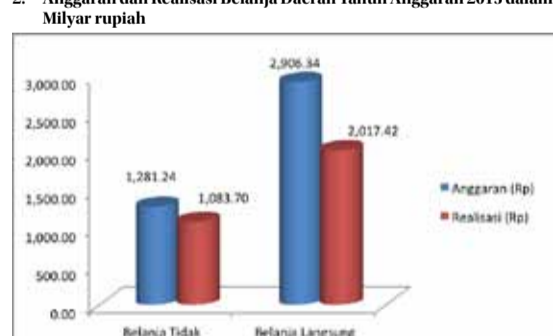
Berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam pelaksanaannya merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Secara garis besar, struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pembiayaan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikut disimpulkan APBD Kota Tangerang dan capaian realisasinya untuk pada Tahun Anggaran 2015.

**1. Persentase Realisasi dan Persentase Target Capaian Pendapatan Tahun Anggaran 2015**



**2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dalam Milyar rupiah**



**3. Pembiayaan**

Untuk Tahun Anggaran 2015, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp893.379.736.255,00 atau 100,00% yang seluruhnya berasal dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Tangerang lebih memanfaatkan penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dalam upaya menutup defisit anggaran yang terjadi.



**VII. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi**

**A. Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah**

RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 berisi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan yang diterjemahkan ke dalam pembagian urusan pemerintahan (urusan wajib dan pilihan), serta program/kegiatan pembangunan beserta indikator dan target-targetnya selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan RKPD Kota Tangerang merupakan turunan (derivasi) dan operasionalisasi tahunan dari RPJMD Kota Tangerang yang memuat rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang terdiri dari program/kegiatan dan pagu anggaran beserta indikator dan target-targetnya selama jangka waktu 1 tahun.

Dalam rangka pencapaian visi misi dan 11 prioritas pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015, melaksanakan 31 urusan yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 5 urusan pilihan, dengan jumlah program sebesar 570 program dan 2.671 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 2.906.336.311.835,45,-. Upaya-upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dikelompokkan dalam urusan-urusan wajib dan pilihan seperti yang terangkum sebagai berikut:

**I. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2015**



**II. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2015**



**B. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kota Tangerang menerima berbagai program/kegiatan dari anggaran tugas pembantuan Pemerintah Pusat, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Dinas Kesehatan**  
Tugas pembantuan yang diterima Dinas Kesehatan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Tahun	Pemberi Tugas	Dasar Hukum
1.	Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	2015	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	SP DIPA- 024.03.4.299487/2015 tanggal 14 November 2014. Dan Revisi Ke-01 pada tanggal 27 Mei 2015

**C. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Tangerang berupaya menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara optimal. Tugas tersebut terfokus kepada kebutuhan masyarakat akan sebuah pemerintahan yang mampu menegakkan hukum dan menciptakan ketertarikan serta kesejahteraan masyarakat. Pelaporan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 meliputi tugas umum sebagai berikut:

- Kerjasama Antar Daerah;
- Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- Koordinasi dengan Pihak Vertikal di Daerah;
- Pembinaan Batas Wilayah;
- Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
- Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterbacaan Umum;



Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kota Tangerang telah melaksanakan kegiatan yaitu penyelenggaraan kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan pihak vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelenggaraan ketertarikan dan keterbacaan umum.

**D. Penghargaan yang diterima Kota Tangerang**

Berkaitan dengan prestasi dan apresiasi, pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Tangerang telah mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi yang dicapai, antara lain:

NO.	PENGHARGAAN/KATEGORI
1.	Anugerah Pangripta Nusantara (APN) Untuk RKPD 2014 di Tingkat Provinsi Banten, Tanggal 20 April 2015
2.	Peringkat Kedua Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 Untuk Kategori Kota Berpenduduk di Atas 1 Juta Jiwa dari Media Kompas, Tanggal 13 Agustus 2015
3.	Penghargaan Wahana Tata Nughra (WTN) Dari Kementerian Perhubungan Karena Mampu Melakukan Penataan Transportasi Yang Berkelanjutan, Berbasis Kepentingan Publik dan Ramah Lingkungan, Tanggal 18 September 2015
4.	Peringkat Kedua Tingkat Nasional Untuk Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDHI) Dari Kementerian Hukum dan HAM, Tanggal 29 September 2015
5.	Penghargaan WTP Kedelapan Kalinya Secara Berturut-turut, WTP Kali ini Pertama Kalinya Diperoleh Oleh Pemkot Tangerang Dalam Penerapan Akutansi Berbasis Akrual Untuk Penyusunan Laporan Keuangan, Tanggal 2 Oktober 2015
6.	National E-Procurement Award Kategori Kepemimpinan dan Transformasi Elektronik 2015 dari LKPP, Tanggal 10 November 2015
7.	Penghargaan Pala Adipura Kategori Kota Metropolitan Tahun 2015 Yang Diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Kepada Walikota Tangerang H.Arief R.Wismansyah di Jakarta, Tanggal 23 November 2015
8.	Penghargaan Plakat Adipura Dari Kementerian Lingkungan Hidup Atas Keberhasilan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Terbaik Dengan Kategori Pasar Bersih Dan Terminal Bersih 2015
9.	Penghargaan Swastisaba Wistara Dari Kementerian Kesehatan Yang diserahkan Langsung Oleh Menteri Kesehatan, Nila Djuwitza F. Moeloek, Tanggal 27 November 2015 Atas Komitmen Pemerintah Kota Tangerang Yang Telah Berhasil Menerapkan 7 Dari 9 Tatanan Kota/Kabupaten Sehat
10.	Penghargaan Sebagai Kota Dengan Peningkatan Indeks Total Keselamatan Jalan Dalam 3 Tahun, Di Ajang Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2015, Penghargaan ini Diberikan Kepada Kota Tangerang Karena Dianggap Mampu Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas Selama 3 Tahun Terakhir



Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Tangerang Tahun 2015, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan melalui perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

